

Studi Agenda *Setting* Film *Silenced* Terhadap Agenda Kebijakan Tentang Kejahatan Seksual Di Korea Selatan

Ni Made Yunantari Dewi¹⁾, Ni Made Ras Amanda Gelgel²⁾, Ade Devia Pradipta³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: yunantaridewi97@gmail.com¹, rasamanda13@gmail.com², deviapradipta88@gmail.com³

ABSTRACT

Film as a mass media is a tool that is used to spread a message to the community. Can also be used to channel various ideas and it can also bring up a plurality of effects after it is aired. One of South Korean Film that brought up an effect after its screening is Silenced. Through qualitative research methods with literature study, researcher found an agenda setting process from Silenced towards the South Korean government policy's agenda about sexual crime. Media's agenda brought up a sexual abused issue that is interacting with public of South Korea's agenda then interacts with the government policy's agenda about sexual crime. This shows that Silenced Film's agenda setting has a connection with South Korean government policy's agenda about sexual crime.

Keywords: South Korea, Film, Sexual Crime, Agenda Setting

1. PENDAHULUAN

Kasus kejahatan seksual termasuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Korea Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data dari Kantor Kejaksaan Agung Korea (Mijeong *et al*, 2011), pada tahun 1999 hingga 2008 kasus kejahatan seksual pada anak di Korea Selatan meningkat setiap tahunnya dan mencapai 16.234 kasus pada tahun 2008.

Salah satu kasus pelecehan seksual pada anak terjadi di SLB Gwangju Inwha, Korea Selatan pada tahun 2000 hingga 2005 (*mtimes.uos.ac.kr*, 2011). Kasus tersebut dikisahkan dalam bentuk film berjudul *Silenced (Dogani)* pada tahun 2011, di mana penayangan film ini menimbulkan efek berupa tuntutan masyarakat kepada pemerintah Korea Selatan mengusut kembali kasus SLB Gwangju Inwha (*mtimes.uos.ac.kr*, 2011).

Kepala Kepolisian Nasional Korea Selatan pada 28 September 2011 mengarahkan untuk mengusut kembali kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha guna menegakkan hak asasi manusia, arahan tersebut diikuti dengan berbagai langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah Korea Selatan terkait kasus SLB Gwangju Inwha dan kejahatan seksual (Bae, 2011).

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses agenda *setting* Film *Silenced* terhadap agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana proses agenda *setting* Film *Silenced* terhadap

agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual.

2. KAJIAN PUSTAKA

Film Sebagai Media Massa

Film sebagai media massa dapat menyebarkan pesan kepada khalayak luas. Menurut Cangara (2004:150), film mempunyai kemampuan untuk dapat menampilkan visual dan audio yang khas, sehingga film sangat efektif sebagai media penyuluhan. Film juga dapat digunakan sebagai saluran berbagai macam ide serta dapat menimbulkan pluralitas efek dari penayangannya (McQuail, 1997).

Teori Agenda Setting Maxwell McCombs dan Donald Shaw

Teori Agenda Setting dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, yaitu apa yang dianggap penting oleh media maka akan dianggap penting juga oleh publik. Dilihat dari jarak waktu, agenda *setting* memiliki hubungan (korelasi) jika antar agenda memiliki jarak waktu yang berdekatan, sedangkan berhubungan sebab-akibat (kausalitas) jika terletak dalam periode waktu yang berbeda.

Adapun proses agenda *setting* menurut Rogers dan Dearing 1987 (Tamburaka, 2013:68), yaitu agenda media berinteraksi dengan agenda publik dan agenda publik berinteraksi dengan agenda kebijakan.

- 1) Agenda media itu sendiri harus diformat.

Terdapat suatu isu yang ditonjolkan dalam agenda media, di mana isu tersebut mempunyai karakteristik. Zucker (1979), terdapat dua jenis isu, yaitu isu menonjol

dan isu tidak menonjol; Yagade dan Dozier (1990), yakni isu abstrak dan isu konkret; dan Palmgreen dan Clarke (1991), yakni isu lokal dan isu nasional.

- 2) Agenda media berinteraksi dengan agenda publik.

Agenda *setting* media dapat menimbulkan terjadinya efek memengaruhi opini publik. Istilah opini publik dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan oleh masing-masing individu (Olii, 2007:19). Dalam opini publik terdapat tiga tahapan terbentuknya opini publik (Olii, 2007:57), yaitu: (1) Tahap I (*stage of brainstorming*), individu mengeluarkan pendapatnya masing-masing; (2) Tahap II (*stage of consolidation*), individu mulai menyatukan pendapat mereka; (3) Tahap III (*the solid stage*), yaitu mulai terbentuknya opini publik.

3. Agenda publik berinteraksi dengan agenda kebijakan.

Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dalam agenda kebijakan terdapat kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pengertian ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

Ada beberapa kriteria isu yang dapat dijadikan kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) salah satunya adalah menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat

manusia) dan mendapat dukungan dari media massa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, internet dan buku. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Miles dan Huberman.

4. PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Film *Silenced (Dogani)* mengisahkan kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha, Korea Selatan yang terjadi pada tahun 2000 hingga 2005. Film ini merupakan film garapan sutradara Hwang Dong-hyuk yang dirilis pada 22 September 2011 di Korea Selatan. Film *Silenced* didistribusikan oleh CJ Entertainment dan meraih 4,7 juta penonton dalam penayangannya serta mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang terletak di benua Asia Timur. Kim Sun-hyuk (2007) dalam Hestningsih (2017), masyarakat Korea Selatan memiliki karakteristik yang mudah marah atau dikenal dengan istilah *naembi munwha*. Dalam sistem pemerintahannya, Republik Korea mengadopsi sistem demokrasi liberal sebagai prinsip dasar pemerintahan.

Hasil Temuan dan Analisa

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan proses agenda *setting* yang terdiri dari tiga, yaitu (1) agenda media Film

Silenced; (2) agenda publik masyarakat Korea Selatan, dan (3) agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual.

Agenda Media Film *Silenced*

Film *Silenced (Dogani)* merupakan film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama berdasarkan kasus pelecehan seksual yang pada tahun 2000 hingga 2005 di SLB Gwangju Inwha, Korea Selatan. Isu yang diangkat dalam Film *Silenced (Dogani)* adalah isu pelecehan seksual.

Pada tahun 2009, ketika Gong Yoo menjalani wajib militernya, atasan Gong Yoo memberikan hadiah berupa sebuah novel berjudul *Dogani* karya sastrawan Korea Selatan, Gong Ji-young. Setelah membaca novel tersebut, ia memiliki ide untuk mengisahkan kasus tersebut ke layar lebar. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi sutradara Hwang Dong-hyuk. Ia bersama Hwang Dong-hyuk menghubungi penulis Gong Ji-young untuk mendapatkan izin atas *copyright* novel *Dogani*. Selanjutnya, Gong Yoo, Hwang Dong-hyuk, dan Gong Ji-young juga turut andil dalam mendapatkan investor untuk membiayai produksi film. Film ini pada akhirnya didistribusikan oleh CJ Entertainment yang merupakan salah satu perusahaan terkuat di Korea Selatan.

Tujuan dikisahkannya kasus tersebut ke layar lebar, yaitu untuk memberitahukan secara luas kepada publik bahwa kasus ini pernah terjadi dan berharap masyarakat Korea Selatan dapat belajar dari kasus tersebut (Hestningsih, 2017).

Agenda Publik Korea Selatan

Setelah dirilisnya Film *Silenced* pada 22 September 2011 di Korea Selatan, publik menaruh perhatiannya pada kasus tersebut, hingga istilah *Dogani Syndrome* dikenal secara luas oleh publik. Publik Korea Selatan mengeluarkan pendapat dan melakukan berbagai gerakan sosial terkait kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha, Korea Selatan. Publik Korea Selatan juga menggalang petisi *online* melalui situs Agora pada 25 September 2011 hingga 20 Oktober 2011 untuk menuntut pemerintah mengusut kembali kasus tersebut dan melakukan aksi demonstrasi di beberapa daerah Korea Selatan (Hestningsih, 2017).

Agenda Kebijakan Pemerintah Korea Selatan Tentang Kejahatan Seksual

Opini publik dan berbagai gerakan sosial yang muncul setelah dirilisnya Film *Silenced* mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah Korea Selatan. Pemerintah akhirnya melakukan berbagai tindakan terhadap kasus tersebut dan memperhatikan lebih serius hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seksual.

Jung Ji-hyo, Kepala Kepolisian Nasional Korea Selatan pada 28 September 2011 mengarahkan membentuk tim investigasi khusus bersama Kepolisian Kota Gwangju guna mengusut kembali kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha dan pada 7 Oktober 2011, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan langkah-langkah penanggulangan terpadu terkait kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha dan kejahatan seksual yang berisikan enam poin langkah-langkah penanggulangan (Bae, 2011:29).

Timeline Proses Agenda Setting

Ketika Film *Silenced* dirilis pada 22 September 2011 di Korea Selatan, publik Korea Selatan mengeluarkan pendapat terkait kasus pelecehan seksual yang dialami siswi SLB Gwangju Inwha pada tahun 2000 hingga 2005 dan menggelar petisi *online* yang dipublikasikan pada 25 September 2011 hingga 20 Oktober 2011 melalui situs Agora serta melakukan aksi demonstrasi di beberapa daerah Korea Selatan menuntut pemerintah mengusut kembali kasus pelecehan seksual, menuntut pemerintah menutup SLB Gwangju Inwha, dan menuntut pemerintah untuk memperberat hukuman pelaku kejahatan seksual.

Selanjutnya, opini publik dan gerakan sosial yang terbentuk mendapat tanggapan dari pemerintah Korea Selatan. Pada 28 September 2011, Jung Ji-hyo, Kepala Kepolisian Nasional Korea Selatan mengarahkan untuk membentuk tim investigasi khusus bersama Kepolisian Kota Gwangju guna mengusut kembali kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha. Pada 7 Oktober 2011, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan langkah-langkah penanggulangan terpadu terkait kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha dan kejahatan seksual.

Analisa

Peneliti menemukan proses agenda *setting* yang terjadi, yaitu agenda media Film *Silenced* berinteraksi dengan agenda publik Korea Selatan dan agenda publik

Korea Selatan berinteraksi dengan agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual.

Agenda media Film *Silenced (Dogani)* mengangkat isu pelecehan seksual. Isu pelecehan seksual yang diangkat dalam film tersebut masuk ke dalam karakteristik isu menonjol, isu konkret, dan isu nasional dikarenakan pelecehan seksual mudah dikaitkan dengan peristiwa sehari-hari dan kasus pelecehan seksual di Korea Selatan terjadi di beberapa daerah dan meningkat setiap tahunnya. Isu pelecehan seksual yang diangkat dalam Film *Silenced* berinteraksi dengan agenda publik Korea Selatan. Opini publik yang terbentuk melalui tiga tahapan, yaitu *stage of brainstorming* ketika individu mengeluarkan pendapatnya terkait kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha; *stage of consolidation* ketika individu menyatukan pendapat terkait kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha; dan *the solid of stage* ketika pendapat-pendapat tersebut menyatu dan membentuk opini publik yang meluas dalam masyarakat. Opini publik yang terbentuk menimbulkan berbagai gerakan sosial diantaranya petisi *online* melalui situs Agora dan aksi demonstrasi yang dilakukan di beberapa daerah Korea Selatan. Hal tersebut dapat terjadi karena didukung oleh karakteristik masyarakat Korea Selatan yang mudah marah (*naembi munwha*).

Opini publik dan berbagai gerakan sosial yang terbentuk (agenda publik) berinteraksi dengan agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual. Isu pelecehan seksual

yang diangkat dalam Film *Silenced (Dogani)* menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan banyak orang (umat manusia) karena kasus pelecehan seksual di Korea Selatan tidak hanya terjadi di satu tempat atau daerah melainkan juga terjadi di beberapa daerah Korea Selatan. Jumlah kasus kejahatan seksual termasuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Korea Selatan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga isu tersebut masuk ke dalam salah satu kriteria isu yang dapat dijadikan kebijakan publik oleh pemerintah Korea Selatan. Dalam penelitian ini ditemukan tahapan *problem definition agenda*, yaitu dikeluarkannya langkah-langkah penanggulangan terpadu terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi di SLB Gwangju Inwha dan terkait kejahatan seksual pada 7 Oktober 2011. Agenda publik Korea Selatan dapat berinteraksi dengan agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual dikarenakan sistem pemerintahan Republik Korea mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi liberal, sehingga apa yang menjadi tuntutan publik atau masyarakat Korea Selatan mendapat tanggapan dari pemerintah.

Berdasarkan *timeline* proses agenda *setting* dan hal-hal lain yang mendukung terjadinya proses tersebut, seperti masyarakat Korea Selatan memiliki karakteristik yang mudah marah (*naembi munwha*) serta sistem pemerintahan Republik Korea mengadopsi sistem demokrasi liberal, maka berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan agenda *setting* Film *Silenced* memiliki hubungan

dengan agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan agenda media Film *Silenced* yang mengangkat isu pelecehan seksual berinteraksi dengan agenda publik Korea Selatan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya opini publik dan berbagai gerakan sosial. Berbagai tuntutan yang diungkapkan publik Korea Selatan mendapat tanggapan dari pemerintah dengan melakukan pengusutan kembali kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha serta mengeluarkan langkah-langkah penanggulangan terpadu terkait kasus pelecehan seksual SLB Gwangju Inwha dan kejahatan seksual. Hal tersebut menunjukkan agenda publik Korea Selatan berinteraksi dengan agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan adanya hal-hal lain yang mendukung terjadinya proses agenda *setting* tersebut diantaranya, masyarakat Korea Selatan memiliki karakteristik yang mudah marah (*naembi munwha*) serta sistem pemerintahan Republik Korea mengadopsi sistem demokrasi liberal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan agenda *setting* Film *Silenced* memiliki hubungan dengan agenda kebijakan pemerintah Korea Selatan tentang kejahatan seksual.

6. DAFTAR PUSTAKA

Cangara, Hafied. 2004.

Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo.

Hestiningsih, Dwi. 2017.

Agensi Gong Ji Young dalam Novel Dogani: Pendekatan Teori Struktural Anthony Giddens.

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Hoon, Lim Gyun. 2011.

Their Stories Not Be Forgotten.

<http://times.uos.ac.kr/news/articleView.html?idxno=1269>

diakses pada 12 Februari 2018.

Ju, Bae Bok. 2011. 영화 〈도가니〉 이후, 무엇이 달라지고 있는가?

<http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4010023381082#>

diakses pada 18 Januari 2019.

Mijeong, Lee *et al.* 2011.

Challenges and responses to child sexual abuse in Korea.

https://www.kdevelopedia.org/Resource/s/all/challenges-responses-child-sexual-abuse-korea--04201203140098182.do?fldlds=TP_SOC%7CTP_SOC_OT#.XMctaOgzblV

diakses pada 1 Maret 2019.

McQuail, D. 1997.

Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Olii, Helena. 2007. *Opini Publik*. Jakarta: PT Indeks.

Tamburaka, Apriadi. 2013.

Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Raja Grafindo.

Yujin, Jang. 2016.

The Deaf and Mute as Subalterns in Korean Contexts: Analysis of Korean Film Of Silenced (Do-Ga-Ni).

<http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/The-Deaf-and-Mute-as-Subalterns-in-Korean-Contexts-Analysis-of-Korean-Film-of-Silenced-Do-Ga-Ni.pdf> diakses pada 20 Maret 2018

